

**BERITA ACARA REKONSILIASI
KAS KEUANGAN PERKARA**

Pada Hari ini Kamis tanggal 27 bulan Maret tahun 2025 telah dilakukan rekonsiliasi dengan kondisi sebagai berikut :

I Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

j. Saldo Bulan Lalu	:	RP. 24.043.170,-
k. Penerimaan	:	Rp. 2.756.000,-
l. Pengeluaran	:	Rp. 4.848.500,-
Jumlah I	:	Rp.21.950.670,-

II. Buku Keuangan Konsinyasi

j. Saldo Bulan Lalu	:	-
k. Penerimaan	:	-
l. Pengeluaran	:	-
Jumlah II	:	Rp.0

III Buku Keuangan Eksekusi

j. Saldo Bulan Lalu	:	Rp.11.794.500,-
k. Penerimaan	:	Rp.2.000.000,-
l. Pengeluaran	:	Rp.8.575.100
Jumlah III	:	Rp.5.218.900,-

IV Buku Keuangan Pidana

j. Saldo Bulan Lalu	:	-
k. Penerimaan	:	-
l. Pengeluaran	:	-
Jumlah IV	:	Rp. -

V Buku Bantu Biaya Proses

j. Saldo Bulan Lalu	:	-
k. Penerimaan	:	-
l. Pengeluaran	:	-
Jumlah V	:	Rp. -

Penjumlahan Rp.27,169,570,-
Menurut Kas:

10. Saldo bank	:	Rp.21.172.613,-
11. Uang Tunai	:	Rp. 5.996.957,-
12. Materai	:	
Saldo Kas	:	Rp.-
Selisih saldo kas	:	Rp. -

Penjelasan : Termasuk di dalam saldo bank tersebut

- Saldo Eksekusi : Rp. -
- Saldo Konsinyasi : Rp. 0
- Saldo Gugatan : Rp.

Uang Pihak Ke3 yang belum di bukukan :

Kasir Perdata

Frans S. Hutariyus, S.H

Panitera

SAPARJIYONO, SH



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

RPL 159 PDT PN SAROLANGUN UTK BIAYA

KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KEC
S,Rt.010/000,SAROLANGUN SAROLANGUN
SAROLANGUN

Tanggal Laporan
Statement Date : 08/04/25

Periode Transaksi
Transaction Periode : 01/03/25 - 31/03/25

No. Rekening : 060401000756300
Account No

Unit Kerja
Business Unit : KC Sarolangun

Nama Produk : Giro Tres,NotP
Product Name

Alamat Unit Kerja
Business Unit Address : Jl. Lintas Sumatera KM.1 Simpang Kantor
Bupati Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun

Valuta
Currency : IDR

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
04/03/25 13:50:27	NBMB SUGENG ARIANTO TO RPL 159 PDT PN SA ESB:NBMB:0001500F:809708761497	8888526	0.00	2,000,000.00	31,066,613.00
05/03/25 12:38:37	NBMB PUTRI RATU AYU TO RPL 159 PDT PN SA ESB:NBMB:0001500F:810138967625	8888498	0.00	1,050,000.00	32,116,613.00
10/03/25 10:50:44	BFVA1984515325030003 YULIA AND:BMRIDJA 20250310BMRIDJA01000228938193 ESB:BFST:0008N:2025031017893495	8888660	0.00	27,500.00	32,144,113.00
10/03/25 13:51:50	BFVA1984515325030004 ANDRIAN E:BSMDIDJA 20250310BSMDIDJA01000203054936 ESB:BFST:0008N:2025031047051484	8888636	0.00	400,000.00	32,544,113.00
10/03/25 14:19:12	ESB:INDS:0002A00W:0502faa44866	0604055	4,650,000.00	0.00	27,894,113.00
12/03/25 13:51:32	BFVA1984515325030005 ANDRIAN E:BSMDIDJA 20250312BSMDIDJA01000208968864 ESB:BFST:0008N:2025031229419557	8888642	0.00	27,500.00	27,921,613.00
18/03/25 08:44:42	ESB:INDS:0002A00W:74186b301acb	0604053	5,000,000.00	0.00	22,921,613.00
18/03/25 12:54:57	BRIVA1984515325030006NBMBYUDHA PRASETYO BRIVA 1984515325030006NBMBYUDHA ESB:NBMB:000CD00P:816082142747	8888330	0.00	19,000.00	22,940,613.00
25/03/25 08:42:37	ESB:INDS:0002A00W:19f30eb943ff	0604053	3,000,000.00	0.00	19,940,613.00
25/03/25 12:05:33	6034949014244177#006298905744#ATM #TRFLA TRF BERSAMA FROM ANDRIAN EVENDI A LA 060401000756300ATM 6034949014244177	0888900	0.00	1,050,000.00	20,990,613.00
26/03/25 15:24:03	BRIVA1984515325030007NBMBMUAZIN BRIVA 1984515325030007NBMBMUAZIN ESB:NBMB:000CD00P:820294326199	8888560	0.00	32,500.00	21,023,113.00
27/03/25 13:30:56	NBMB MUFNI MAULID TO RPL 159 PDT PN SA ESB:NBMB:0001500F:820783174964	8888591	0.00	117,000.00	21,140,113.00
27/03/25 14:38:48	BRIVA1984515325030009NBMBMUFNI MAULID S BRIVA 1984515325030009NBMBMUFNI ESB:NBMB:000CD00P:820818822013	8888069	0.00	32,500.00	21,172,613.00

Created By BRISIM
04/08/2025 03:05:57 PM



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
29,066,613.00	12,650,000.00	4,756,000.00	21,172,613.00

Terbilang / In Words

DUA PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU ENAM RATUS TIGA BELAS RUPIAH
TWENTY ONE MILLION ONE HUNDRED SEVENTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED THIRTEEN RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambaranya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
04/08/2025 03:05:57 PM





LAPORAN MONEV
TLHP PENGAWASAN BIDANG
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
BULAN JANUARI TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
SAROLANGUN

	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	Nomor	A.F.11.2024
	Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Revisi	-
	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tanggal	13 Februari 2024
	LAPORAN MONEV TLHP PENGAWASAN BIDANG	Halaman	2 of 3
	Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Website : www.pn-sarolangun.go.id		



Perihal: Laporan Monev TLHP

Sarolangun, 27 Februari 2025

Pengawasan Bidang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Di - Sarolangun

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidangterdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Hukum;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Perdata;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada PTSP;
7. Dzakky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Pidana;

Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:

- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
- **Kepaniteraan Hukum:** telah berkoordinasi dengan Kepaniteraan Pidana agar menyerahkan berkas perkara yang sudah diminutasi SIPP agar segera diserahkan Kepaniteraan Hukum. Temuan bulan sebelumnya ada 108 (seratus delapan) perkara dan saat ini telah turun menjadi 48 (empat puluh delapan) perkara;
- **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
- **Kepaniteraan Perdata:**
 1. Perkara eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2024/PN Srl sudah dilakukan *aanmaning*, perkara eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan eksekusi, dan perkara eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan pencabutan permohonan eksekusi;
 2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata

akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;

3. Biaya pemeriksaan setempat terlalu kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan semestinya untuk pemeriksaan setempat, akan segera dilakukan rapat pembahasan evaluasi biaya pemeriksaan setempat;
- **Bagian Kepegawaian Ortala:** Usulan KGB telah selesai ditindaklanjuti;
- **Bagian PTIP:**
 1. akan dilakukan pembelian website dalam bulan Februari 2025, namun saat ini masih menunggu revisi rencana penarikan dana bulan Februari 2025;
 2. sudah disediakan map untuk dokumen arsip, namun belum dilakukan penyusunan pada rak arsip;
- **Bagian Umum dan Keuangan:** -

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Koordinator Pengawasan
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 19761109 200112 2 002

LAPORAN MONEV
TLHP PENGAWASAN BIDANG
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
SAROLANGUN

	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	Nomor	A.F.11.2024
	Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH)	Revisi	-
	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Tanggal	13 Februari 2024
	LAPORAN MONEV TLHP PENGAWASAN BIDANG	Halaman	2 of 3



Perihal: Laporan Monev TLHP

Sarolangun, 28 Maret 2025

Pengawasan Bidang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Di - Sarolangun

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidangterdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Hukum;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Perdata;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada PTSP;
7. Dzakky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Pidana;

Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:

- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
- **Kepaniteraan Hukum:** -
- **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
- **Kepaniteraan Perdata:**
 1. Perkara eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2024/PN Srl sudah dilakukan *aanmaning*, perkara eksekusi No. 2/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan eksekusi, dan perkara eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2024/PN Srl dilakukan pencabutan permohonan eksekusi;
 2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;
 3. Biaya pemeriksaan setempat terlalu kecil dibandingkan dengan biaya yang harus

dikeluarkan semestinya untuk pemeriksaan setempat, akan segera dilakukan rapat pembahasan evaluasi biaya pemeriksaan setempat;

4. Perbaikan redaksi putusan No. 8/Pdt.G/2023/PN Srl jo PT Jambi No. 119/Pdt.G/2023/PN Srl sudah dilakukan dengan pengiriman berkas perkara dari Mahkamah Agung;

- **Bagian Kepegawaian Ortala:** -

- **Bagian PTIP:** -

- **Bagian Umum dan Keuangan:** Tanaman liar pada taman Pengadilan telah dibersihkan;

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Koordinator Pengawasan
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 19761109 200112 2 002

LAPORAN MONEV
TLHP PENGAWASAN BIDANG
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
BULAN MARET TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
SAROLANGUN

	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Nomor	A.F.11.2024
	Revisi	-	
	LAPORAN MONEV TLHP PENGAWASAN BIDANG	Tanggal	13 Februari 2024
	Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Website : www.pn-sarolangun.go.id	Halaman	2 of 3



Perihal: Laporan Monev TLHP

Sarolangun, 24 April 2025

Pengawasan Bidang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Di - Sarolangun

Dengan hormat,

Bersama ini kami melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Bidang Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Hakim Pengawas bidang terdiri dari:

1. Raymon Haryanto, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Hukum;
2. Tumpak Hutagaol, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
4. M. Yuli Setiawan, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Perdata;
5. Yola Nindia Utami, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
6. Juwita Daningtyas, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada PTSP;
7. Dzakky Hussein, S.H., selaku *Hakim Pengawas* pada Kepaniteraan Pidana;

Dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut:

- **PTSP:** Harddisk PTSP belum disediakan oleh bagian Umum karena masih dalam proses pengadaan;
- **Kepaniteraan Hukum:** Telah diajukan pengadaan rak arsip baru yang dapat ditempatkan di dinding ruang arsip seperti *kitchen set* kepada Panitera agar kemudian dikoordinasikan dengan bagian kesekretariatan;
- **Kepaniteraan Pidana:** Temuan pengisian buku register induk perkara pidana belum selesai ditindaklanjuti;
- **Kepaniteraan Perdata:**
 1. Sudah dilakukan koordinasi kepaniteraan dan kesekretariatan dengan sepengetahuan pimpinan untuk pemenuhan jumlah personel SDM pada kepaniteraan perdata;
 2. Berkas perkara No. 1/Pdt.G/1997/PN Bko tersimpan pada ruang kepaniteraan perdata akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat yang berisi konfirmasi status berkas perkara bersangkutan ke PN Bangko;

- **Bagian Kepegawaian Ortala:** Belum ada tindak lanjut atas temuan absensi manual;
- **Bagian PTIP:**
 1. Data website dalam proses pembaruan;
 2. Laporan pada aplikasi E Monev belum dapat dilaksanakan dikarenakan gangguan pada aplikasi;
- **Bagian Umum dan Keuangan:** Daftar Barang Ruangan di ruangan-ruangan telah diperbarui;

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatian Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Koordinator Pengawasan
Pengadilan Negeri Sarolangun



NOVARINA MANURUNG, S.H.
NIP. 19761109 200112 2 002

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 25 April 2025

Nomor : 108 /KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/IV/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : - Sosialisasi SPIP
- Sosialisasi Whistle Blowing System
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Yth. Hakim,
Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan undangan Sosialisasi mengingat pentingnya Acara ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Sosialisasi tersebut yang akan diselenggarakan

Pada hari, tanggal : Senin, 28 April 2025
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara : - Sosialisasi SPIP
- Sosialisasi Whistle Blowing System
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan : -



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)
Nomor : 108/KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/IV/2025

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Acara : Rapat Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Pejabat Struktural
6. Pejabat Fungsional
7. Staf
8. PPNP

Jalannya rapat :

Tim Penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Pengadilan Negeri Sarolangun menyampaikan materi terkait sosialisasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) , yang pada pokoknya sebagai berikut

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI;
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

Penjelasan mengenai SPIP

Sistem Pengendalian Interen Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat system lainya adalah system pengendalian eksteren pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan dan perundang – undangan. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat menditeksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir tindakan yang dapat merugikan Negara. Unsur – unsur SPIP yang terdiri dari : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian interen.

Tugas masing – masing Tim :

Penanggungjawab

1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP'
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP;

Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
2. Mengkoordiansikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP;
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarkan administrasi kegiatan satgas penyelenggara SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

-
- 2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
 - 3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - 4. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan;

Anggota Satgas

- 1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai bagian / bidang masing – masing;
- 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang / bagian masing – masing;
- 3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
- 4. Bertanggung jawab atas data dan hasil penyelenggaraan SPIP di bidang / bagian masing – masing ;

Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pada pukul 10.10 WIB.

Notulis

Yuli Kurniati

NIP. 199307112022032015

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Novarina Manurung

NIP. 197611092001122002



DOKUMENTASI SOSIALISASI SPIP



<p>PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum</p>	Nomor	A.F.11.2024
	Revisi	-
	Tanggal	13 Februari 2024
	Halaman	1 of 2



DAFTAR HADIR

- Sosialisasi SPIP
- Sosialisasi Whistle Blowing System
- Sosialisasi Penanganan Benturan kepentingan
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Pengadilan Negeri : Sarolangun

Tanggal : 28 April 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Novanto Manurung.	Kpn.	
2	Triyadi H	Hakim	
3	Reindra Dti sinaga	Hakim	
4.	M. Yuli S	Hakim	
5	Hola Nindas	Hakim	
6	Deddy Herdian	Hakim	
7.	Venny Pramono	Anisy	
8	Sugihyo	Pantang.	
9.	Harliyaryati	As. Pdtm	
10.	Olega Ultimus	Kp	
11.	Rizky M. Wulan	Kp	
12	Binnaini Dabukka	Um & Lu	
12	Suci W	PPNPW	
12	Nurhan Dika	Praktik	



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan
tingguH (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DAFTAR HADIR

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Nomor

A.F.11.2024

Revisi

13 Februar
2024

Halaman

2 of 2





MANAJEMEN RESIKO
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG KAB. SAROLANGUN
TELP / FAX : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id Email : sarolangun_pn@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai hasil dari reformasi pemerintahan, dituntut adanya reformasi birokrasi. Termasuk diantara ini Mahkamah Agung mencanangkan "Cetak Biru" (Blue Print) sebagai sasaran yang hendak dituju yang hal itu diketahui dari visi Mahkamah Agung RI untuk tercapainya peradilan yang agung dan modern.

Untuk mencapai hal tersebut maka dalam berbagai kebijakannya Mahkamah Agung menetapkan adanya suatu standar penjaminan mutu pelayanan yang terakreditasi dengan menggunakan "Standar Operasional Prosedur" (SOP). Standar pelayanan itu tidaklah dengan mudah dicapai atau dipertahankan, mengingat baik sumber daya manusia (*human resources*), sistem maupun infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai atau sebagaimana diharapkan.

Kendala-kendala teknis dan non teknis yang selalu ada dan perlu prosedur penanganan, audit dan evaluasi dari Top Manajemen dan Manajemen Representatif yang selalu dilakukan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan standar yang ditentukan.

Salah satu alat manajemen mutu untuk mengantisipasi tidak tercapainya apa yang diharapkan, adalah dengan melakukan analisa risiko (*risk analysis*) sebagai bagian dari manajemen risiko (*risk management*) yang harus diperhitungkan untuk menjamin terselenggaranya jaminan mutu pelayanan (*quality management insurance*) yang berkesinambungan.

Risiko atau "*risk*" adalah pengaruh atau efek ketidakpastian pada tujuan. Adapun terhadap risiko dalam suatu manajemen dapat diberi catatan:

1. Efek atau pengaruh adalah penyimpangan dari yang tidak diharapkan baik positif maupun negatif (*An effect is a deviation from the expected - positive and/or negative*), "
2. Tujuan dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat diharapkan pada tingkat yang berbeda (*Objectives can have different aspects (such as financial, health and safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as strategic, organization-wide, project, product and process)*).

3. Risiko sering ditandai dengan mengacu pada peristiwa potensial dan konsekuensi atau kombinasi keduanya (*Risk is often characterized by reference to potential events and consequences, or a combination of these*)

Semua bentuk kegiatan mengandung potensi risiko yang harus diidentifikasi (identifying), dianalisis (analyzing) dan dievaluasi (evaluating) kriteria-kriteria risiko, sehingga risiko dapat diketahui dan diatasi. Diperlukan komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang memantau, menganalisa serta mengontrol resiko sehingga dapat dipastikan bahwa resiko lebih lanjut tidak perlu ada.

Ketika diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ini, manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk, misalnya:

- Meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan;
- Mendorong manajemen proaktif
- Meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman;
- Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang relevan dan norma-norma;
- Meningkatkan pelaporan wajib dan sukarela;
- Meningkatkan tata kelola;
- Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kepercayaan;
- Meningkatkan kontrol;
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional;
- Meningkatkan pencegahan kerugian dan manajemen insiden;
- Meminimalkan kerugian;
- Meningkatkan pembelajaran organisasi; dan
- Meningkatkan ketahanan organisasi.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (*risk assessments* dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Memberikan gambaran profit risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pembelajaran dalam pemahaman risiko pada tugas dan kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
3. Memberikan saran masukan kepada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA dan pimpinan lainnya mengenai penanganan risiko di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penilaian risiko adalah penilaian risiko atas peran Pengadilan Negeri Sarolangun pertama dalam memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Penilaian risiko (*risk assessment*) difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun baik pada fungsi teknis maupun fungsi pendukung.

D. DASAR HUKUM

Penerapan Manajemen Risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019, Tanggal 1 Juli 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

BAB II

PEMBAHASAN

Pelaksanaan proses manajemen risiko secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menetapkan Konteks

Sebelum menetapkan konteks yang akan dinilai, terlebih dahulu perlu pemahaman proses kegiatan (*business process*) Pengadilan Negeri Sarolangun. Pada tahap penetapan konteks ini terdapat beberapa hal yang akan menjadi perhatian Tim Audit Internal yakni:

Konteks Eksternal dan Konteks Internal Organisasi

Terkait konteks ini, Tim Audit Internal melakukan penelaahan hubungan antara organisasi Pengadilan Negeri Sarolangundan lingkungan eksternal secara menyeluruh dimana organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun melaksanakan aktivitasnya. Misalnya: membina hubungan dengan pihak eksternal, peraturan, persaingan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan untuk konteks Internal Tim Audit Internal melakukan penelaahan terhadap aktivitas dan kemampuan orgainsasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi serta kapabilitas organisasi terkait dengan SDM, sistem, sarana dan prasarana, dan sumber dayalainya.

2. Konteks Manajemen Risiko

Pada konteks ini, Tim Audit Internal menentukan luas dan dalamnya aktivitas manajemen risiko yang akan dilaksanakan serta pendekatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari manajemen risiko. Sebagai tahap awal akan dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko sebelum dilanjutkan pada langkah *piloting* dan manajemen risiko secara penuh pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum melakukan penilaian risiko, instansi pemerintah harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang ditetapkan mencakup tujuan entitas (instansi) dan tujuan kegiatan. Tujuan entitas (instansi) umumnya terkait dengan lataran stratejik sedangkan pada tujuan kegiatan lebih mengearah kepada process business yang terjadi pada entitas tersebut.

Pelaksanaan penilaian risiko di Pengadilan Negeri Sarolangun akan dilaksanakan pada lataran stratejik (tujuan entitas) dan lataran kegiatan (tujuan kegiatan).

3. Mengidentifikasi risiko

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam tahapan ini, Tim menggali risiko yang akan dikelola oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi. Beberapa cara yang digunakan dalam kajian ini adalah:

a. Kajian Dokumen

Kajian dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memahami tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Dokumen-dokumen yang dikaji meliputi:

Renstra Pengadilan Negeri Sarolangun; SOP Pengadilan Negeri Sarolangun, Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Ketentuan-ketentuan Audit dalam Pengadilan Negeri Sarolangun;

b. Hasil Rapat Bulanan

Dalam tahap awal identifikasi risiko dilakukan dari hasil rapat bulanan yang melibatkan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang dibagi dalam beberapa kelompok atau melalui *focus group discussion* (FGD).

c. Diskusi Tim Audit Internal

Hasil dari diskusi antar peawai Pengadilan Negeri Sarolangun disarikan lagi oleh Tim Audit internal dan disusun dalam bentuk kuesioner yang dikembalikan lagi kepada pegawai untuk dinilai masing-masing risiko yang telah ditetapkan dalam konteks.

4. Menangani Risiko

Proses penanganan risiko adalah proses memilih dan melaksanakan pilihan-pilihan penanganan guna menghindari, menurangi, mengalihkan atau menerima risiko. Penilaian risiko ini merupakan tahapan awal (initial) dari implementasi manajemen risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, oleh karena itu pada tahap ini, Tim Audit Internal menyimpulkan beberapa alternatif penanganan risiko sebagai bahan pertimbangan dalam merancang tindak penanganan risiko selanjutnya.

A. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI RISIKO

Langkah selanjutnya setelah tahap identifikasi risiko adalah analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk memisahkan risiko tingkat rendah dengan risiko tingkat tinggi. Analisis risiko dapat dilakukan jika sudah diketahui seberapa sering peluang terjadinya dan seberapa besar pengaruh dampaknya. Untuk mengetahui hal tersebut

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5X5			DAMPAK				
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
			1	2	3	4	5
HAMPIR PASTI TERJADI	91-99%	5	5	10	15	20	25
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51%-90%	4	4	8	12	16	20
MUNGKIN TERJADI	31%-50%	3	3	6	9	12	15
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11%-30%	2	2	4	6	8	10
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1%-10%	1	1	2	3	4	5

Tabel Status Resiko

DESKRIPSI	LEVEL	RANGE NILAI
EKSTRIM/SANGAT TINGGI	5	15 s/d 25
TINGGI	4	10 s/d 12
MODERAT	3	5 s/d 9
SEDANG	2	3 s/d 4
RENDAH	1	1 s/d 2

1. Tingkat risiko sangat tinggi = Area bersama merah

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat besar hingga cukup besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat besar = 5) dan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya cukup besar = 3).

2. Tingkat risiko tinggi = Area bersama jingga

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

3. Tingkat risiko sedang = Area berwarna kuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

4. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas

tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya cukup besar = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 10 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya kecil = 2 atau probabilitasnya jarang = 2 dan dampaknya sangat besar = 5).

5. Tingkat risiko sedang = Area bewarnakuning

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari sangat kecil hingga sangat besar. Batas tertinggi nilai risiko adalah 9 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya cukup besar = 3) dan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sangat besar = 5).

6. Tingkat risiko rendah = Area bersama hijau muda

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sering hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari besar hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya besar = 4) dan batas terendahnya adalah 3 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat kecil = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya sedang = 3).

7. Tingkat risiko sangat rendah/tidak signifikan = Area bersama hijau

Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya jarang terjadi hingga sangat jarang dan memiliki nilai pengaruh dampak dari kecil hingga sangat kecil. Batas tertinggi nilai risiko adalah 2 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya sangat kecil = 1) dan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang terjadi = 1, dan dampaknya sangat kecil = 1).

Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki aspek implementasi risiko dan dampak yang tersebar pada tujuh sumber/kelompok risiko. Hasil analisis sebaran per kelompok berdasarkan area risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Area risiko sangat tinggi
2. Area risiko tinggi
3. Arearisikosedang
4. Arearisikorendah
5. Area risiko sangat rendah/tidak signifikan

B. MANAJEMEN RESIKO PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Manajemen Resiko Pengadilan Negeri Sarolangun terdiri dari 4 Form dan terdiri dari 6 Bidang

Form 1 : Formulir Register Resiko

Form 2 : Status Risiko Sisa(Inherent Risk)

Form 3 : Status Risiko Sisa (Residual Risk)

Form 4 : Proses Pelaksanaan Kegiatan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan Manajemen Risiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang pada muaranya adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan.

B. Saran

Manajemen Risiko perlu disusun dengan lebih komprehensif dengan pendekatan yang holistik sehingga didapatkan pemahaman yang utuh akan peran masing-masing komponen dalam struktur organisasi yang pada akhirnya tercermin dalam budaya kerja yang sadar risiko.

Penanganan Risiko membutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dari semua komponen dalam organiasasi. Oleh karena itu kondusifitas kantor harus terus dijaga dan diupayakan sehingga semua komponen dalam struktur organisasi dapat menjalin kerjasama yang semakin erat sebagai satu tim untuk mencapai tujuan bersama.



Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

N o	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Proses penyerahan perkara pidana biasa	<ul style="list-style-type: none"> - yang cepat dan sederhana - Tertib - Administrasi Memenuhi ketentuan KUHAP 	Pelimpahan berkas pidana bisa dari JPU ke PN Sarolangun Kelas II yang penahanannya sudah hampir habis	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa keluar demi hukum dari LP atau Rutan 	Kurang profesionalisme JPU dan JPU melaksanakan tugasnya tidak sesuai aturan	Pengadilan Negeri dianggap tidak propesional dan tidak sesuai SOP	Panitera Muda Pidana
2	Penuntut Umum tidak pernah menyerahkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi ke Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Tertib - Administrasi Memenuhi ketentuan KUHAP 	Berita Acara Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi - Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa 	JPU tidak tertib	Menghalangi tupoksi tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri	Panitera

Form-2

STATUS RISIKO SISA/INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
 TAHUN 2024

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
Misi :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan KualitasKepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK	STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori		Nilai	Kategori
1	2	3	4	5		
1	- Terdakwa keluar demik hukum dari LP atau Rutan	5	Sangat Tinggi	4	Tinggi	20
2	- Kolom register pelaksanaan eksekusi tidak dapat diisi - Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa	4	Sangat Tinggi Tinggi	3	Sedang Sedang	15 12

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon I/I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			STATUS RESIKO			TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN				
		Nilai	Kategori	No	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	16	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- Terdakwa keluar demi hukum dari LP atau Rutan	20	Ektrim / Sangat tinggi	1	- Menolak pelimpahan berkas perkara yang pernahannya sudah hampir habis namun JPU masih memiliki kewenangan untuk memperpanjang anpen ahan Terdakwa - Melakukan Kordinasi pada pimpinan Kejaksaan Negeri	Efektif /	10	1	Kemungkinan inan terjadi	1	Kemungkinan inan terjadi	1	Kemungkinan inan terjadi	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah			

Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/I/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO PERDATA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan TK. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Proses	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Permohonan Bantuan Delegasi Masuk	Mendukung Penyelesaian Proses Perkara Perdata di PN Pengaju	- PN Pengaju tidak Mengiput Permohonan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP	Plt. Panitera tidak menunjuk Jurusita/jurusita Penggantiuntuk melaksanakan Delegasi tersebut;	PN Panitera dapat menunjuk Jurusita/jurusita Penggantiuntuk melaksanakan Delegasi tersebut;	Register Elektronik tidak Sinkron dengan Register Delegasi;	Permohonan Bantuan Delegasi Tidak dapat dilaksanakan, sehingga proses penyelesaian perkara perdata menjadi tertunda;	Plt. Panitera Muda Perdata.
2	Permohonan Delegasi Keluar	Mendukung Proses Penyelesaian Perkara PN Sarolangun	- PN Pelaksanaan lambat mengembalikan/ Mengirimkan Relas, sehingga menjadi terhambat dalam proses persidangan.	Pelaksanaan Sidang terganggu;	Relas Panggilan Sidang tidak dilaksanakan sesuai Aturan	Penyelesaian Perkarajadi terlambat;		Plt. Panitera Muda Perdata.
3	Pelaksanaan Eksekusi	Melaksanakan Putusan Pengadilan	- Pengamanan terhadap apparat pelaksana eksekusi	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	Perbedaan kepentingan antara Para Pihak	Terganggunya pelaksanaan Eksekusi		Plt. Panitera Muda Perdata

Form-2

STATUS RISIKO SISA/(INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		Nilai	DAMPAK	Kategori	Nilai	STATUS RISIKO BAWAAN
		Nilai	Kategori					
1	Plt. Panitera PN tidak dapat menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut;	4	Kemungkinan Besar Terjadi	4	Tinggi		16	Ekstrem/ Sangat Tinggi
2	Pelaksanaan Sidang terganggu;	4	Kemungkinan Besar Terjadi	3	Sedang		12	Tinggi
3	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	4	Kemungkinan Besar Terjadi	5	Sangat Tinggi		20	Ekstrem/ Sangat Tinggi

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

VISI MISI :
 1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
 2. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 3. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 4. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
Tujuan Sasaran :
 1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO TOLERANSI TERHADAP RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		Nilai	Kategori	Nilai	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Plt. Panitera PN tidak menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut;	2	3	4	PN dapat Menginput Permononan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP	5	6	7	8	9	10		
1	Plt. Panitera PN tidak menunjuk Jurusita/jurusita Pengganti untuk melaksanakan Delegasi tersebut;	16	Ekstrem / Sangat Tinggi	1	PN Pengaju agar Menginput Permononan Delegasi kedalam Aplikasi SIPP	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	3	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah
2	Pelaksanaan Sidang terganggu;	12	Tinggi	2	Menghubungi Nomor Telpon ada HP ke PN yang dituju	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	3	Rendah	2	Sangat Rendah
3	Terjadi Benturan dalam pelaksanaan Eksekusi	20	Ekstrem / Sangat Tinggi	3	Dilakukan Mediasi antara para pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan	Efektif	40 %	3	Mungkin Terjadi	2	Rendah	4	Rendah

Form-4

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024**

Proses Manajemen :		Proses Pelaksanaan Kegiatan														
Pengendalian :		Service, Control														
No	Level Manajemen	Kegiatan Utama Dalam Proses Manajemen	Tujuan Kegiatan	Proses Yang perlu dikendalikan	Potensi Risiko dalam proses	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Tingkat Risiko	Sisa Risiko	Tingkat Risiko Yang Ditargetkan	Unsur dan Sub Unsur SPIP	Infrastruktur Yang Diperlukan	Waktumulai Implementasi Infrastruktur	Penanggung Jawab Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO HUKUM TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan Tk. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Proses	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1.	Pelayanan Surat Keterangan Elektronik.	Mempermudah pelayanan kepentingan masyarakat secara elektronik untuk Surat Keterangan Dinyatakan Pailit, Tidak Sebagai Terpidana, Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Surat Keterangan Dipidana, karena kealpaan ringan atau alas an politik, Surat Keterangan Tidak Punya Tanggapan Hutang yang dapat merugikan Negara.	Masyarakat harus mengajukan permohonan melalui aplikasi Eraterang.	Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	Pelayanan Aplikasi Eraterang dapat dilaksanakan secara Maksimal.	Tidak memahami cara menggunakan Aplikasi Eraterang tersebut.	Masyarakat yang layanan harus melakukan pendaftaran Eraterang ke Pengadilan.	Panitera Muda Hukum

Form-2

STATUS RISIKO SISA/(INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI** : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
- Tujuan** :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	
1	2	3		4		5
1.	Pelayanan Aplikasi Eraterang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	4	Kemungkinan Besar Terjadi	3	Sedang	12 Tinggi

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
 TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN	PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN	DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN	STATUS RESIKO	TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO	TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
			Nilai	Kategori	No					Nilai	Kategori
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
1.	Pelayanan Aplikasi Eraterrang belum dapat dilaksanakan secara Maksimal.	8	Moderat	Sosialisasi	Efektif 40	3	Mungkin Terjadi	2	Rendah	4	Rendah
										3	Rendah

Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

Proses Manajemen :			Proses Pelaksanaan Kegiatan													
Pengendalian:			Service, Control													
No	Level Manajemen	Kegiatan Utama Dalam Proses Manajemen	Tujuan Kegiatan	Proses Yang perlu dilakukan	Potensi Risiko dalam proses	Dampak Risiko	Tingkat Risiko	Pengendalian Yang Ada	SisaRisiko o	Tingkat Risiko Yang Ditargetkan	Unsur dan Sub Unsur SPIP	Penyebab Masih Ada yang Sisa Risiko	Infrastruktur Yang Dipelukan	Waktumulai implementasi Pembangunan Infrastruktur	Penanggung jawab Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO UMUM DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan Tk. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	KegiatanUtama	TujuanKegiatan	Proses DalamPelaksanaanKegiatan	UraianResiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Tata Kelola Masuk	Surat Terlaksana dan terdokumentasi Surat Masuk dengan baik.	- Menerima Surat Masuk PTSP; - Petugas PTSP menginput Surat Masuk pada Aplikasi PTSP; - Ketua/Wakil Ketua Memberi Disposisi Surat Masuk kepada Panitera/Sekretaris; - Panitera/Sekretaris mendisposisi Kepada Surat Masuk Panmud/Kasubbag; - Panmud/Kasubbag Mendisposisi/Melaksanakan Isi Surat tersebut;	Apabila Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;	Alat Scanner Rusak;	E-Documen tidak dapat terbaca pada Aplikasi PTSP+;	Kasubbag Keuangan; Umum dan
2	Penatausahaan Peralatan dan Mesin Berupa Mesin Genset	Terlaksananya kegiatan kantor dalam keadaan Mati Lampu.	- Menghidupkan Mesin Genset Ketika Listrik Mati (10-15 menit Setelah lampu Mati); - Matikan AC atau Alat Elektronik Lainnya yg tidak terpakai; - Naikkan Tuas Arus Keluar dari MesinGenset;	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses;	Listrik PLN Padam	Tidak adanya Arus Listrik, sehingga pekerjaan terganggu.	Kasubbag Umum dan Keuangan;

Form-2

STATUS RISIKO SISA(*INHERENT RISK*)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

- VISI** : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
- Tujuan** :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO		KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3	4	5				
1	Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, maka surat tersebut tidak dapat diproses;	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	6	Sedang	1.2	Tinggi	
2	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses;	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	6	Sedang	1.2	Tinggi	

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

- VISI**
MISI
- : Mewujudkan Pengadilan Negeri Senget Yang Agung
 - : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 - 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 - 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 - 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA		KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN		STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RISIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		Nilai	Kategori	N o	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai i	Kategori	Nilai i	Kategori	Nilai i	Kategori	Nilai	Kategori	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
1	Apabila Tidak diinput pada Aplikasi PTSP, makasurat tersebut tidak dapat diproses;	12	Tinggi	1	Perawatan BMN Secara berkala untuk menghindari kerusakan pada alat Scanner;	Efektif	5 %	1	Kemungkinan Tidak Terjadi	1	Kemungkinan Tidak Terjadi	1	SangatRendah	1	SangatRendah	
	Apabila tidak dihidupkan Mesin Diesel, Pekerjaan yang dalam keadaan Penting dapat terganggu dan tidak dapat diproses;	12	Tinggi	2	Perawatan dan Pengisian BMN Secara Rutin untuk menghindari Kerusakan dan Kehabisan BBM	Efektif	15 %	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	Kemungkinan Kecil Terjadi	2	Rendah	2	Rendah	

Form-4

IMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2024

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO KEPEGAWAIAN ORGANISASI TATA LAKSANA TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Pengadilan Tk. Banding : Pengadilan Tinggi Jambi
Pengadilan Tk. Pertama : Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1.	Pengusulan Kenaikan Pangkat	Memenuhi hak-hak kepegawaian ASN	Usul Kenaikan Pangkat secara 1) Manual 2) Otomatis	ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat	Adanya syarat Pangkat	Hak ASN tidak dapat dipenuhi	Kasubbag Kepegawaian Ortala

Form-2

STATUS RISIKO SISA(INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK	STATUS RISIKO BAWAAN	
		Nilai	Kategori		Nilai	Kategori
1	2	3	4	5	5	5
Pengusulan Kenaikan Pangkat	ASN tidak dapat diteruskan Kenaikan Pangkat	4	Tinggi	3	Sedang	12
						Tinggi

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2020A

VISI
MISI

VISI
MISI

VISI
MISI

VISI
MISI

Tujuan Sasaran

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN			PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			STATUS RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN	
		Nilai	Kategori	No	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3		4		5	6			7		8		9		10		10	
Pengusulan Kenaikan Pangkat ASN tidak dapat diteruskan	Kenaikan Pangkat	10	Tinggi	Kuliah S2	Efektif	100%	3	sedang	4	Tinggi	10	Sedang	3	Tinggi	3	Sedang	3	sedang	

Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/I/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadian Tingkat Banding
TAHUN 2024

Form-1

FORMULIR REGISTER RISIKO PTIP TAHUN ANGGARAN 2024

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNIT ESELON I
Pengadilan Tk. Banding
Pengadilan Tk. Pertama
: Pengadilan Tinggi Jambi
: Pengadilan Negeri Sarolangun

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Proses Dalam Pelaksanaan Kegiatan	Uraian Resiko	Penyebab	Dampak	Risk Owner
1	Penyusunan RKA-KL	Penyediaan dana kebutuhan untuk belanja operasional kantor dan belanja modal sarpras	1. Mengkompilasi data usulan darimasing-masing bagian 2. Penyiapan data dukung berupa TOR, RAB dan HPS 3. Menginputusulan kedalam aplikasi RKA-KL	Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)	1. Tidak adanya dana meyewa konsultan dalam membuat RAB belanja Modal Gedung dan Bangunan 2. Tidak adanya tenaga ahli dibidang perencanaan	RAB yang disusun tidak sesuai dengan standar sehingga menyebabkan usulanbelanja modal gedung dan bangun tidak dikabulkan	Kasubag PTIP
2	Penyusunan Laporan	Pertanggung jawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna menggambarkan capaian atas kinerja selama 1 tahun	1. Mengumpulkan data darimasing-masingbagian 2. Menyajikan data dalamlaporan	Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/Laporan Kinerja	Penginputan data di SIPP masihhada yang tidaktertib	Data yang disajikan kurang valid, antara manual dan SIPP tidaksinkron	Kasubag PTIP
3	Persidangan Elektronik	Utuk memewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya riangan	1. Pendaftar User Pengguna. 2. E Filling (pendaftaran online) 3. E Payment (pembayaran) 4. E summon (panggilan online) 5. E litigasi (persidangan online)	1. Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt 2. Belum bisa putusan secara elektronik	1.Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki email. 2.Tanda Tangan digital belum tersedia (Mahkamah Agung masih menjalani kerjasama dengan Badan Sandi Negara)	Pelaksanaan Sidang Elektronik belum dapat berjalan dengan maksimal	Kasubag PTIP

Form-2

STATUS RISIKO SISA (INHERENT RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

- VISI** : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun
- Tujuan** :
Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO		KEMUNGKINAN		DAMPAK		STATUS RISIKO BAWAAN	
	1	2	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal Fisik (Gedung Bangunan)	90%	4		12	Sedang	10,8	Tinggi
2	Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan kinerja	25%	3		6	Rendah	1,5	Sangat Rendah
3	Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt	70%	4		12	Sedang	8,4	Moderat

Form-3

STATUS RISIKO SISA (RESIDUAL RISK)
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/II/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024

VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Agung
MISI :
 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

Tujuan Sasaran :

Ref Kegiatan	URAIAN RESIKO	STATUS RISIKO BAWAAN		PENGENDALIAN YANG ADA			KEMUNGKINAN SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			DAMPAK SETELAH ADANYA PENGENDALIAN			STATUS RESIKO TERHADAP RESIKO		TINGKAT TOLERANSI TERHADAP RESIKO		TINGKAT RISIKO YANG DITARGETKAN		
		Nilai	Kategori	N	Uraian	Efektif/ Tdk	%	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sulitnya dalam membuat RAB dan HPS untuk Belanja Modal (Gedung Bangunan)	10,8	Tinggi	1	Menjalain kerjasama dengan pekerjaan terkait usulan belanja modal gedung dan bangunan	Effektif	75%	8,1	Moderat	2,7	Rendah	2,03	Rendah	1	Sangat Rendah	2	Sangat Rendah		
2	Kesulitan dalam memvaliditas data yang akan disajikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan kinerja	1,5	SangatRendah	1	Pengawasan melekat dari pimpinan dan Majelis Hakim terkait ketertiban penginputan data di aplikasi SIPP	Effektif	90%	1,35	Sangat Rendah	0,15	Sangat Rendah	0,14	SangatRendah	0,5	SangatRendah	1	Sangat Rendah		

		Mengumumkan dalam group whatsapp terkait tunggakan tunggakan di SIPP						
3	Pemberian reward setiap bulannya dari pimpinan bagi panitera pengganti yang berkinerja baik untuk memotivasi panitera pengganti yang lain							
3	Tidak dapat melakukan pendaftaran perkara melalui ecourt	8,4	Moderat	1	Efektif Melakukan sosialisasi kepada para perangkat pemerintahan terkait implementasi ecourt	50% Rendah	2,1 Rendah	1,05 Rendah

Form-4

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Unit Eselon I/I/Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tingkat Banding
TAHUN 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

Sarolangun, 26 Agustus 2024

Nomor : 503 /KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Wakil Ketua, Hakim
Plt. Panitera, Sekretaris, Para Panitera
Muda, dan Para Kepala Subbagian
Di Tempat

Dalam rangka pemenuhan tindaklanjut temuan Ampuh dan Pengawasan Daerah dari Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Jambi terkait langkah-langkah antisipasi penanganan resiko khususnya mengenai status resiko dan resiko sisa untuk itu diperlukan pertemuan untuk membahas perubahan dalam laporan Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Selasa / 27 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara : Rapat Manajemen Resiko

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan Bapak/Ibu datang tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAMBI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun, Kelurahan Gunung Kembang,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi 37481
Telp/Fax : (0745) 91006. Website : www.pn-sarolangun.go.id

NOTULA

Dasar : Undangan Rapat Manajemen Resiko Nomor :
503/KPN.W5-U8/UND.PW1/VIII/2024

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra

Acara : Rapat Manajemen Resiko
Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Plt. Panitera
5. Sekretaris
6. Pejabat Struktural
7. Pejabat Fungsional
8. Staf
9. PPNPN

Jalannya rapat :

Wakil Ketua sebagai Pimpinan Rapat membuka rapat Manajemen Resiko 2024 pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh seluruh peserta rapat.

Adapun beberapa poin Resiko pada Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai berikut :

1. Keamanan dalam persidangan untuk Majelis Persidangan
2. Keamanan Data Jika Listrik Padam
3. Keamanan Arsip perkara jika terjadinya kebakaran atau Berkas perkara yang hilang
4. Keamanan Kantor dari Pengunjung sidang, tahanan, Pengguna layanan.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun pada pukul 11.30 WIB.

Notulis



Yuli Kurniati

NIP.199307112022032015

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana

NIP. 198012082003122001

DOKUMENTASI
RAPAT MANAJEMEN RESIKO





PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan
tangguH (AMPUH)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor

A.F.11.2024

Revisi

-

Tanggal

13 Februari
2024**DAFTAR HADIR**

Halaman

1 of 2

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
 Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
 Website : www.pn-sarolangun.go.id



DAFTAR HADIR
Rapat Manajemen Resiko

Pengadilan Negeri : Sarolangun

Tanggal : 27 Agustus 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Delia Diana	W.W	
2.	Novanno Manure.	W.Pn.	
3	Raymond H	Hakim	
4.	Junita Damayatun	Hakim	
5	Reindra JH. Sinaga	Hakim	
6.	Adoi H.R.	Sekebakus	
7.	Binnaria Paluhu	Um & k	
08.	Dedek M. Barus	Pamud Hukum	
09.	Olga Ulina	PTIP	
10.	H. Silas	Pans Perwak	
11	Yuu Kurniati	Staf	